

Seorang Guru SD di Lebak Dilarikan ke RS Usai Diduga Dianiaya Sesama Guru

written by Editor2 - | 15 September 2023



Kabar6-Badriyah, salah seorang guru di SD Negeri 1 Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, harus dilarikan ke rumah sakit di Rangkasbitung.

Guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tersebut hanya bisa terbaring di salah satu ruangan perawatan rumah sakit.

Badriyah mengalami memar dan merasakan sakit di kepala usai diduga dianiaya oleh pria berinisial S yang tak lain adalah sesama rekan guru di tempatnya mengajar. S disebut-sebut adalah guru senior di sekolah tersebut.

Kepala SD Negeri 1 Cempaka, Nenah, membenarkan terkait dugaan penganiayaan yang dialami Badriyah terjadi di lingkungan sekolah yang dipimpinnya.

“Kejadiannya tanggal 13 September kemarin sekitar jam 9.30 pagi di ruang guru. Saya sedang di belakang sekolah dapat

laporan dari salah satu guru kalau Ibu Badriah dipukul oleh Pak S," kata Nenah, Kamis (14/9/2023).

Dia mengatakan belum mendapatkan informasi secara jelas yang kemudian menjadi pemicu hingga berujung pada penganiayaan tersebut.

****Baca Juga:** [Pejabat Bank Banten Dituntut 9 Tahun Penjara Kasus Kredit Fiktif Rp61 Miliar](#)

Begitu juga kata, Badriyah pun tidak mengetahui masalah apa yang melatarbelakangi hingga ia mendapat perlakuan kekerasan oleh S yang merupakan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

"Saya tidak tahu persis ya masalah mereka berdua, tapi saat saya tanya ke Ibu Ibad (Badriyah-red), dia juga mengaku tidak tahu apa kesalahannya. Kalau dari keterangan Ibu Ibad, kejadian itu swaktu dia ngambil mangkok di ruangan," tuturnya.

Didampingi Nenah, Badriyah lalu melakukan visum dan kemudian melapor ke pihak kepolisian sektor setempat.

"Saya dampingi karena saya merasa punya tanggung jawab, apalagi ini dialami oleh seorang perempuan," katanya.(Nda)

Tiga Warga Korban Keracunan Makanan di Cijaku Lebak Dirujuk ke RS

written by Redaksi | 15 September 2023



Kabar6-Tiga orang warga yang diduga keracunan makanan nasi kotak dari sebuah acara selamat di Cijaku, Kabupaten Lebak, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping.

“Iya betul (Tiga pasien dirujuk) kemarin,” kata Kepala Puskesmas Cijaku, Susilo kepada Kabar6.com, Minggu (23/1/2022).

Susilo mengatakan, tiga warga yang sebelumnya dirawat di puskesmas tersebut harus dirujuk karena memiliki penyakit bawaan sehingga membutuhkan penanganan lanjutan.

“Tiga pasien itu, satu anak, satu remaja dan satu lagi dewasa. Tapi kabar yang saya dengar 2 orang sudah pulang, jadi tinggal 1 orang yang lagi dirawat,” ungkap Susilo.

**Baca juga: [Sekolah Pemilu KAHMI Lebak Diyakini Cetak Calon Pemimpin Berkualitas](#)

**Cek Youtube: [Saksikan Podcast 5W1H, Edisi Ramai-ramai Isu Kota Tangerang Tengah](#)

Hingga siang tadi, total ada sebanyak 171 orang yang diduga keracunan dengan gejala yang dialami muntah, pusing dan diare. Sebanyak 85 orang sudah dibolehkan pulang, 9 orang masih

dirawat, 74 pasien rawat jalan, dan 3 orang dirujuk ke rumah sakit.

“Masih bisa ditangani oleh kami, dan mudah-mudahan besok sudah sehat. Kalau pun ada perburukan pastinya akan kami rujuk sesuai SOP,” terang Susilo.(Nda)

Sarpras Kalah Lengkap Dengan RS Lain, Jadi Alasan RSUD Serpong Utara Sepi

written by Redaksi | 15 September 2023



Kabar6-Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Kabid Yankes) Dinas

Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Dinkes Tangsel), Imbar Umar Ghazali menyebutkan, alasan utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serpong Utara masih sepi dikarenakan masyarakat lebih memilih rumah sakit dengan fasilitas dan sarana yang lebih lengkap.

Hal itu diungkapkannya menanggapi persoalan RSUD Serpong Utara yang masih terpantau sepi, dan tidak terlihat adanya pelayanan.

Pria yang akrab disapa, dr. Imbar ini mengatakan, alasan selanjutnya kenapa RSUD Serpong Utara khusus Covid-19 masih sepi adalah karena tenaga medis yang belum tersedia 100 persen dan landainya angka penularan Covid-19 di Kota Tangsel.

“Jadi gini kenapa belum ada pasien, RSUD itu dikhususkan untuk Covid-19, sedangkan sekarang sudah landai (angka Covid-19). Kemudian walaupun ada Covid, tentu yang berebut adalah pertama RSUD Pamulang. Kedua, rumah sakit yang punya sarana yang dibutuhkan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (25/5/2021).

Menurutnya, saat ini RSUD Serpong Utara masih melakukan rekrutmen terhadap tenaga kesehatan yang baru terisi 60 persen, dan gaji dari tenaga kesehatan juga belum ditentukan. Hal itu, menurutnya, karena pihaknya tak mau mempekerjakan sembarangan orang, sehingga tak terjadi masalah kedepannya.

“Belum ada Direktornya. Tenaga kesehatan juga baru 60 persen, ini sedang perekrutan. Fasilitas yang tersedia di RSUD Serut sudah tersedia. Mulai tempat tidur, oksigen, jalur oksigen, fentilator. Obat-obatan sudah ada,” ungkapnya.

**Baca juga: [Kasus Covid-19 Tambah 29, 46 RT di Tangsel Zona Kuning](#)

Oleh karena itu, Imbar menjelaskan, jika masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel membutuhkan perawatan pasien Covid-19, maka RSUD Serpong Utara ini sudah siap.

“Jika dibutuhkan, RSUD Serut sudah siap. Tapi karena ada rumah sakit yang lebih bagus serta fasilitas lebih lengkap maka ditangani di rumah sakit yang lebih lengkap itu. Jika ada masyarakat pasien Covid-19 yang ingin dirujuk ke RSUD Serut bisa saja, cuma pasien Covid-19 itu kan ada rujukan terpadu (Ruter, red) lewat telepon 119,” tutupnya.(eka)

Pasien Tak Mampu Diangkut Mobil Pikap ke RS, Begini Penjelasan Puskesmas Munjul Pandeglang

written by Redaksi | 15 September 2023



Kabar6- Nengsih (38) warga Kampung Pasanggrahan, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang dibawa menggunakan mobil pikap karena tidak mampu membayar biaya

mobil ambulance dari Puskesmas ke rumah sakit.

Namun pihak Puskesmas Munjul, Kabupaten Pandeglang menjelaskan peristiwa itu terjadi. Pihak Puskesmas mengatakan, Nengsih dirawat di PKM Munjul, melainkan sempat dirawat di salah satu rumah Sakit di Kecamatan Panimbang.

“Pasien itu di rawat bukan di PKM, tapi di RS Alinda Panimbang,” ujar Kepala Puskesmas Munjul Mulyadi saat dikonfirmasi, Minggu (23/5/2021).

Menurutnya pasien tersebut datang ke pada hari Rabu (19/5) kurang lebih dua jam, selanjutnya pasien di rujukan ke RS Alinda di Panimbang.

“Dua jam di PKM Munjul pada hari Rabu pagi jam 9-30 di rujuk sekitar 11-30 langsung rujuk ke RS Alinda Panimbang dan setelah di rawat di Alinda pasien di saranin ke Serang tetapi pasien pulang paksa tidak di rujuk ke Serang,”terangnya.

Hari berikutnya tepat pada Jumat malam, lanjut Mulyadi keluarga pasien hendak merujuk ke Serang. Lantaran sakit makin parah, akhirnya pasien tersebut transit terlebih dulu ke Puskesmas Munjul untuk meminta obat penenang dan anti nyeri.

” Setelah itu karena obatnya (gak ada) karena apotiknya tutup. Ditanya gimana ini, katanya mau di rujuk aja pake mobil ini (losbak),” kata Mulyadi mengulang cerita pegawainya saat itu.

Pegawainya sempat menanyakan kepada keluarga pasien apakah saat pasien di rujuk menggunakan mobil pikap. Waktu itu ada pun pembatasan antara pegawai dan pihak keluarga terkait penggunaan ambulance, hingga muncul biaya yang harus dikeluarkan keluarga pasien.

Sebab dikatakannya, pihak Puskesmas tidak tahu menahu jika pasien itu hendak menggunakan fasilitas Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebab, pihak keluarga sempat mengutarakan, pengobatan Nengsih melalui jalur pasein umum.

“Kalau dia mengatakan menggunakan SKTM ya menang di Puskesmas tidak bisa mengklaim SKTM. Tapi saat itu pas ditanya dia pake BPJS atau pake umum, dia bilang pake umum,”bebernya.

Pegawainya saat itu, lanjut Mulyadi sempat memberikan penjelasan mekanisme penggunaan ambulance termasuk surat rujukan yang dibuat dokter untuk ke rumah sakit. Rujukan itu bisa dilakukan setelah ada konfirmasi dari pihak rumah sakit.

“Ini bisa di rujukan pakai ambulance nanti supirnya di telpon sambil membuat rujak. Rujukan itu dibuat dokter terus konfirmasi ke rumah sakit, nanti kalau kata rumah sakit okeh baru (bisa dirujuk,”ungkap Mulyadi menceritakan perbincangan pegawainya dengan pihak keluarga pasien.

Mulyadi berdalih pegawai sempat menawarkan penggunaan ambulance tersebut, namun pihak keluarga Nengsih, kata dia, tetap berangkat menggunakannya mobil pikap. Mulyadi juga menyesalkan keluarga pasien tidak terbuka jika pengobatan Nengsih menggunakan fasilitas SKM.

“Saya orangnya terbuka kalau memang tidak punya uang ini itu, kalau ada yang menerangkan pake SKTM pegawai saya pasti telpon. Siapa sih yang gak dibantu. Ini mah seolah-olah orang tidak mampu mengeluarkan ongkos Rp 350 ribu naik losbak. Ssya sudah banyak membantu orang-orang seperti itu, tapi tidak terekspos, yang seperti ini di ekspos, tapi ya sah-sah saja,”tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengalaman pahit harus dialami Nengsih (38) warga Kampung Pasanggrahan, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.

Warga Bupati Pandeglang Irna Narulita itu harus dianggkut menggunakan mobil pikap untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke RSUD Banten lantaran tak sanggup membayar ongkos mobil ambulance dari Puskesmas Munjul.

Peristiwa itu terjadi Jumat (20/5/2021) pukul 03:00 WIB dini

hari. Warga miskin itu harus dibawa menggunakan mobil pikap dari Munjul yang jaraknya belasan kilometer hingga alun-alun Pandeglang dalam kondisi sakit parah. Dari situ baru lah Nengsih di bawa menggunakan mobil ambulance milik relawan.

Fajar Pratama Relawan Fbn Banten menceritakan peristiwa yang dialami Nengsih. Mulanya Nengsih dirawat di Puskesmas Munjul selama dua hari namun tidak ditangani, padahal penyakit usus buntu yang di deritanya harus segera ditangani.

**Baca juga: [Dua Kali Selat Sunda Digoyang Gempa, Ditengah Kabar Hoaks OTT KPK di Pandeglang](#)

Bahkan saat relawan hendak meminta rujukan pun sulit, alasan pihak Puskesmas di sana tidak ada dokter, sehingga belum ada diagnosa penyakit Nengsih.

“Di Puskesmas Munjul dua hari, tapi tidak ada penanganan. Terus relawan di sana saat minta rujukan sulit gak di kasih alasnya gak ada dokter sehingga belum ada diagnosa,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Sabtu (22/5/2021).(aep)

Gugus Tugas Covid-19 Lebak Sebut 5 Pasien yang Dipulangkan dari RS Belum Aman

written by Redaksi | 15 September 2023



Kabar6-Hasil swab lima pasien positif virus Corona atau Covid-19 asal Kabupaten Lebak yang berada di RSUD Banten menunjukkan negatif Corona.

Berdasarkan surat keterangan hasil swab tersebut, kelima warga Cimarga, Rangkasbitung, Cirinten, Cihara, dan Leuwidamar dipulangkan dari rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19.

Namun, kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Lebak Firman Rahmatullah, meski sudah dipulangkan, kelimanya belum bisa dianggap aman.

“Belum, belum bisa dikategorikan aman. Kerana setelah dipulangkan karena hasil swab negatif, mereka masih harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumahnya,” terang Firman, Jum’at (19/6/2020).

Untuk itu, Gugus Tugas Covid-19 Lebak belum memasukkan

kelimanya ke dalam data Siaga Covid-19 dengan kategori aman.

****Baca juga:** [Hasil Swab Negatif, Lima Pasien Positif Covid-19 Asal Lebak Dipulangkan.](#)

“Iya karena mereka harus isolasi mandiri dulu, tidak boleh ke mana-mana. Di dalam rumah pun mereka harus menerapkan protokol kesehatan sampai sampai dengan kategori mereka aman,” tutur Firman.

Walaupun hasil swab terakhir negatif Corona, namun kelimanya tetap diberi obat oleh rumah sakit untuk diminum selama masa isolasi pasca hasil swab negatif.

“Mereka tetap diberikan obat selama isolasi mandiri,” katanya.(Nda)

Tolak RS Banten Turun Kelas, Pemprov Bentuk Tim Dukungan Administratif

written by Redaksi | 15 September 2023



Kabar6-Pemprov Banten membentuk Tim Dukungan Administratif merespon Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap rekomendasi penurunan tipe 21 rumah sakit (RS) di Banten.

Tim tersebut nantinya akan bekerja untuk menyusun sanggahan secara lengkap untuk mendukung agar rekomendasi penurunan tipe RS dari Kemenkes RS menjadi batal.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, secara umum pihaknya memiliki waktu 28 hari sejak rekomendasi dari Kemenkes diterbitkan per 15 Juli lalu. Pihaknya pun langsung bekerja, menyiapkan seluruh dokumen. Agar bisa optimal, dia membentuk Tim Dukungan Administratif.

“Kita sedang mempersiapkan menggunakan waktu formal masa sanggah untuk me-review kembali apa-apa yang diperlukan sehingga kita minimal tidak turun. Membuat Tim Dukungan Administratif saya saja, tidak ada pada tim-tim yang lain,” ujarnya, kemarin.

Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu menuturkan, tim tersebut akan menjadi pendukung dirinya dalam menyusun

sanggahan ke Kemenkes. Sebab, pemprov ingin sanggahan yang diberikan betul-betul lengkap sehingga rekomendasi bisa dibatalkan.

“Saya intens day to day melakukan itu (penyusunan sanggahan). Saya optimis karena menggunakan hak kita. Kita lengkapi sesuai prosedur itu, mungkin nanti kita konsultasi ke Jakarta (Kemenkes-red), ini harus kita bangun bersama,” katanya.

Ia menegaskan, sanggahan yang disusun tidak hanya untuk RSUD Banten melainkan bagi 20 RS yang juga direkomendasi turun tipe atau kelas. Pemprov tak akan membiarkan RS yang masuk daftar Kemenkes itu turun kelas begitu saja. Sebab, hal itu akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di Banten.

Bahkan pada pekan kemarin, Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah melakukan pertemuan dengan 21 RS tersebut dengan tujuan yang sama. Pemprov ingin permasalahan itu disikapi bersama agar hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan.

“Pak Gubernur maksudnya itu, agar jangan sampai berefek kepada penurunan tingkat layanan kepada masyarakat. Apa sih penyebab teknis (rekomendasi turun tipe). Saya akan clear-kan dulu secara administratif apa yang kurang. Kita review, kita lengkapi dokumennya,” ungkapnya.

Disinggung apakah rekomendasi turun tipe ada kaitannya dengan membengkaknya pembayaran asuransi Badan Layanan Jaminan Sosial (BPJS), Al Muktabar tak ingin berandai-andai. Meski demikian, dia tak menutup kemungkinan untuk melakukan pembahasan dengan BPJS.

“Kita tidak saling menyalahkan dan seterusnya, kita akan melihat mana yang kurang dan kita perbaiki. Tidak saja menyelesaikan RSUD Banten tapi ada banyak. Termasuk BPJS, kalau sudah semua insert data kalau ada ruang dengan BPJS tentu kita koordinasi,” tuturnya.

Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Banten Drajat Ahmad Putra

menegaskan, pihaknya akan mempertahankan status RS Banten seperti statusnya saat ini tipe B.

Hal itu lantaran kedudukannya sebagai RS milik Pemprov Banten. Selain itu, untuk meraih tipe B pihaknya sudah memenuhi seluruh standar yang ditetapkan.

****Baca juga: [Deadline Bikers Hadir di Banten, Wadah Pecinta Motor Bagi Insan Pers.](#)**

“Kita sekarang melakukan self assessment, artinya kita coba isi kembali sesuai format yang harus diisi dari Kemenkes dan nanti ada penilaiannya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenkes merekomendasikan agar 21 RS di Banten untuk turun kelas atau tipe. Kebijakan tersebut diberikan berdasarkan review layanan BPJS.

Yang berdampak pada penyesuaian tipe RS. rekomendasi tersebut tertuang dalam surat nomor HK.04.01/I/2963/2019 yang ditujukan kepada gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia.(Den)

Limbah RS Murni Asih, Begini Kata Anggota DPR RI

written by Redaksi | 15 September 2023



Kabar6-Keluhan bau tak sedap dari limbah Rumah Sakit Murni Asih, Anggota DPR RI menegaskan seharusnya rumah sakit harus mengikuti peraturan yang ada.

Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz M.Si. mengatakan, tidak diperbolehkan limbah cair termasuk limbah B3 sampai merembes ke lahan warga. Apalagi ada bau tak sedap yang dikeluarkan dari limbah cair tersebut.

“Seharusnya pihak rumah sakit mengikuti peraturan yang ada. Dan sudah seharusnya rumah sakit menjaga kebersihan dan kesehatan. Baik di rumah sakit maupun lingkungan sekitarnya,” jelas Irgan, Sabtu (2/3/2019).

Irgan menjelaskan, limbah cair dari rumah sakit termasuk B3 dapat menimbulkan bau pada air tanah di sekitarnya jika merembes atau dibuang ke tanah. Apalagi rumah sakit tersebut berada tak jauh dari lingkungan rumah warga.

“Disamping rawan ke lingkungan, limbah itu dapat mengandung beragam jenis kuman dan penyakit,” ujarnya.

****Baca juga: [Pembangunan MCP, Kasubnit Tipikor Polresta: Semua](#)**

[Ijin Lengkap.](#)

Sementara, saat akan dikonfirmasi wartawan, pihak rumah sakit ataupun kuasa hukumnya belum memberikan keterangan lanjutan terkait keluhan warga tersebut. (Tim K6)

Kuasa Hukum RS Murni Asih: Kalau Mau di Blow-up ke Media, Silahkan Saja

written by Redaksi | 15 September 2023



Kabar6 – Terkait keluhan warga RT 002 RW 01 Kampung Medang, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, tentang dugaan limbah B3 dan bau tak sedap yang di buang

kepemukiman warga oleh Rumah sakit Murni Asih.

Pihak RS Murni Asih menjelaskan, bila ingin konfirmasi terkait perihal itu langsung saja ke kuasa hukum rumah sakit dan melarang media untuk mencantumkan nama rumah sakit itu di dalam berita.

“Kami belum dapat memberikan keterangan tentang persoalan limbah tersebut. Dan menyerahkan Kuasa Hukum Rumah Sakit Murni Asih,” kata staf rumah sakit yang tak mau menyebutkan namanya.

Sementara, kuasa hukum Rumah sakit Murni Asih, Bryan menuturkan, untuk sementara waktu pihak Rumah Sakit Murni Asih belum bisa memberikan keterangan terkait limbah B3 maupun bau tak sedap yang di hasilkan dari rumah sakit.

**Baca juga: [Limbah Rumah Sakit Murni Asih, Warga Medang Keluhkan Bau Tak Sedap.](#)

“Kalau warga RT 002 RW 01 Kampung Medang tidak sabar menunggu silahkan laporkan ke pihak dinas terkait dan mempersilahkan memblow up nya ke media, Tapi saya berjanji permasalahan ini segera diselesaikan,” ungkapnya saat di hubungi melalui selularnya. (Tim K6)